

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pemerintah daerah pada dasarnya memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat, sehingga kemudian muncul ketimpangan dalam pemerataan pelayanan publik (Wahyudi & Sari, 2011). Tidak jarang kemudian masyarakat daerah tertentu memilih mengakses pelayanan ke daerah lain daripada daerahnya sendiri (Wahyudi & Sari, 2011). Kota dan daerah tetangga saling berinteraksi untuk memenuhi kepentingannya sendiri ataupun kepentingan yang lebih luas (Seyler, 1974; Visser, 2002). Kota dan daerah tetangga yang saling berinteraksi hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan merugikan daerah tetangga, maka akan mendorong munculnya konflik antar daerah.

Interaksi kota dan daerah tetangga tersebut akan mempertemukan kepentingan otonomi masing-masing daerah yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sifat dan pelaksanaan otonomi setiap daerah yang beragam. Otonomi daerah yang fleksibel akan mendorong interaksi berlangsung secara intensif dan dinamis melalui sebuah kerja sama antardaerah (Basolo, 2003). Sebaliknya, otonomi daerah yang kaku akan mendorong daerah tersebut untuk saling berkompetisi dan cenderung memunculkan konflik antar daerah (Basolo, 2003). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tersebut dilaksanakan melalui prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi.

Prinsip desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hirarki politik-administrasi dan kewilayahan (Crook dan Manor, 1998; Agrawal and Ribot, 1999 dalam Wahyono dkk., 2013). Dalam prakteknya di Indonesia, prinsip desentralisasi ini diwujudkan melalui penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk didalamnya urusan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian prinsip dekonsentrasi adalah penyebaran lembaga-lembaga pemegang wewenang pemerintah pusat ke daerah (Bilouseac and Zaharia, 2009 dalam Wahyono dkk., 2013). Dalam prakteknya di Indonesia, prinsip dekonsentrasi ini diwujudkan melalui pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk menjembatani pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pemerintah pusat terhadap urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, urusan yang menjadi kewenangan provinsi adalah urusan yang penggunaan, dampak, dan manfaatnya bersifat lintas batas, serta penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien apabila dilakukan oleh provinsi, sehingga jelas dipahami bahwa interaksi antara kota dan daerah tetangganya adalah kewenangan dari provinsi melalui gubernur. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama berdasarkan pertimbangan efisiensi pelayanan, prinsip saling menguntungkan, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerja sama tersebut juga dapat dipandang menjadi sebuah keharusan apabila urusan pemerintahan tersebut memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan pelayanan publik akan menjadi lebih efisien apabila dikelola bersama.

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah keegoisan daerah, yang mana pemerintah lokal memandang pemerintahannya memiliki kewenangan mutlak atas daerahnya, sehingga menyebabkan kerja sama antardaerah menjadi sulit untuk dilakukan (Firman, 2010). Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan tujuan dari kebijakan otonomi daerah dan dapat menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat (Firman, 2010). Oleh karena itulah, perlu dibentuk kerja sama antardaerah dalam rangka pengembangan wilayah kota dan kabupaten di Indonesia (Firman, 2010). Kerja sama antardaerah tersebut melibatkan dua atau lebih pemerintah daerah yang berdekatan dengan tujuan untuk mewujudkan pengembangan lokal dan regional yang berkelanjutan (Firman, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dijelaskan bahwa kerja sama dengan daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kemudian kerja sama sukarela adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Salah satu kerja sama yang memiliki *track record* berhasil dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah di Indonesia adalah kerja sama Kartamantul. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui Sekretariat Bersama Kartamantul. Sekretariat Bersama Kartamantul ini memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam pembangunan perekonomian wilayah dan konservasi lingkungan, sehingga melalui lembaga ini para pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi pengelolaan infrastruktur di tingkat wilayah (Hudalah, Firman, & Woltjer, 2014)

Kerja sama Kartamantul adalah kerja sama antardaerah di Provinsi D.I. Yogyakarta yang melibatkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Latar belakang pembentukan kerja sama Kartamantul diawali dengan pembentukan aglomerasi Perkotaan Yogyakarta. Kemudian diadakan program pembangunan prasarana kota terpadu berupa TPA Regional yang berlokasi di Piyungan, Kabupaten Bantul. TPA tersebut dikelola secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini yang kemudian menjadi tahap awal dari terbentuknya kerja sama Kartamantul. Sebelum adanya TPA Regional tersebut, masing-masing daerah memiliki TPA masing-masing, namun TPA yang ada tidak memenuhi standar kualitas lingkungan dan kesulitan mewadahi volume sampah yang terus bertambah akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Kemudian juga semakin tidak memungkinkan untuk mempertahankan TPA yang ada karena kondisi keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta untuk melakukan perluasan TPA guna menampung peningkatan volume sampah dan kondisi geomorfologis Kabupaten Sleman sebagai daerah resapan air sehingga dikhawatirkan menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itulah, pada tahun 1995 Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta membangun TPA regional yang berlokasi di Piyungan, Kabupaten Bantul untuk mewadahi pembuangan sampah 3 kabupaten/kota tersebut. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta menetapkan syarat yaitu 3 kabupaten/kota harus menutup semua TPA yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota.

Pada tahun 2001 kemudian disepakati pembentukan Sekretariat Bersama Kartamantul. Pengelolaan TPA Piyungan kemudian dikoordinasikan melalui Sekretariat Bersama Kartamantul dengan dikelola secara bergantian setiap 2 tahun oleh 3 kabupaten/kota tersebut. Sekretariat Bersama Kartamantul selain mengkoordinasikan pengelolaan TPA Piyungan, juga memiliki tugas dan fungsi lain berkaitan dengan fasilitasi, mediasi, dan koordinasi pengelolaan persampahan. Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwasannya pengelolaan TPA Regional dilakukan oleh pemerintah provinsi, sehingga kemudian terjadi perpindahan kewenangan pengelolaan dari yang sebelumnya oleh Dinas Lingkungan Hidup 3 kabupaten/kota dengan dikoordinatori oleh Sekretariat Bersama Kartamantul berpindah kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pelaksanaan kerja sama pengelolaan persampahan di Kartamantul tersebut menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain belum ditemukannya solusi konkrit terkait kondisi TPA Piyungan yang mendekati kapasitas maksimal penampungan sampahnya, belum ditemukannya bentuk penanganan dampak negatif bagi masyarakat di sepanjang rute pengangkutan sampah, belum semua titik sampah ilegal tertangani, dan belum berjalan optimalnya TPS 3R yang ada di masing-masing wilayah kabupaten/kota untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Berbagai pernyataan sebelumnya mengindikasikan bahwa meskipun kerja sama

Kartamantul termasuk dalam contoh berhasil pelaksanaan kerja sama antardaerah di Indonesia, namun masih terdapat sejumlah masalah dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Oleh karena itulah kemudian diperlukan penelitian terkait kinerja lembaga kerja sama tersebut dalam melakukan pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana kinerja lembaga kerja sama tersebut dalam mengelola bidang persampahan di Kawasan Kartamantul tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Sekretariat Bersama Kartamantul pertama kali disepakati untuk dibentuk pada tahun 2001 sekaligus secara resmi sebagai awal terbentuknya kerja sama Kartamantul. Kerja sama ini termasuk sebagai salah satu kerja sama dengan *track record* yang berhasil dalam melakukan kerja sama di Indonesia. Sekretariat Bersama Kartamantul sendiri memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam pembangunan perekonomian wilayah dan perlindungan atau konservasi lingkungan. Lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, dan mediator ini diharapkan dapat mendorong para pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi pengelolaan infrastruktur di tingkat wilayah (Hudalah dkk., 2014). Meskipun demikian, pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan persampahan di Kartamantul tersebut masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain belum ditemukannya solusi konkrit terkait kondisi TPA Piyungan yang mendekati kapasitas maksimal penampungan sampahnya, belum ditemukannya bentuk penanganan dampak negatif bagi masyarakat di sepanjang rute pengangkutan sampah, belum semua titik sampah ilegal tertangani, dan belum berjalan optimalnya TPS 3R yang ada di masing-masing wilayah kabupaten/kota untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dituangkan dalam pertanyaan penelitian, yaitu *“Sejauh mana kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul?”*

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi kerja sama pada lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) Kartamantul

2. Menganalisis kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul
3. Menganalisis faktor penentu kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul.

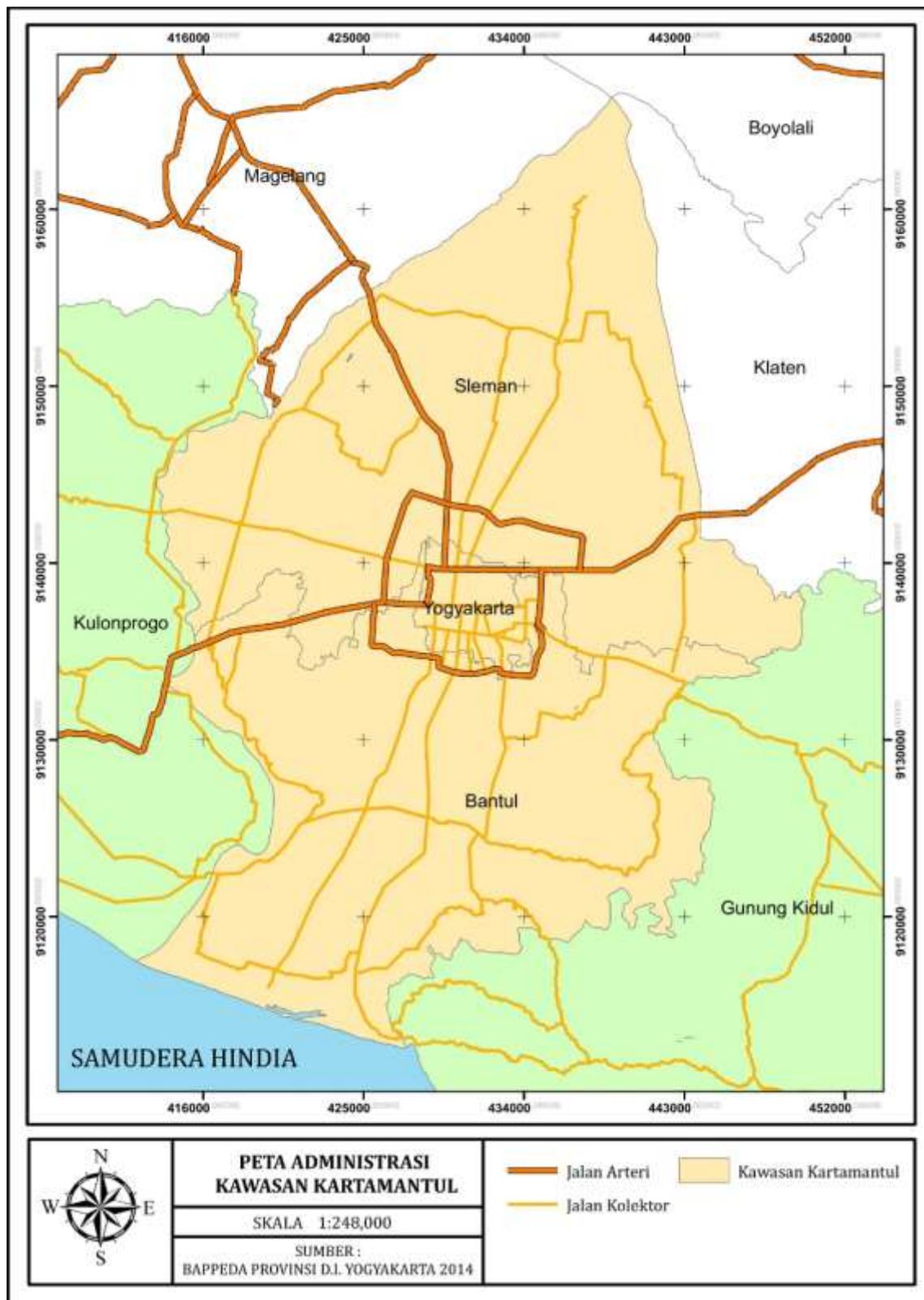
1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Berikut ini merupakan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan penelitian ini meliputi kawasan Kartamantul yang terdiri 3 kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. 3 kabupaten/kota yang tergabung dalam kerja sama Kartamantul ini terletak di Provinsi D.I. Yogyakarta. Batas administrasi Kawasan Kartamantul tersebut,yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kawasan Kartamantul

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini berfokus pada kajian analisis kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul. Pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kajian kondisi kerja sama pada lembaga kerja sama antardaerah (KAD) Kartamantul
- Kajian kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul
- Kajian faktor penentu kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul.

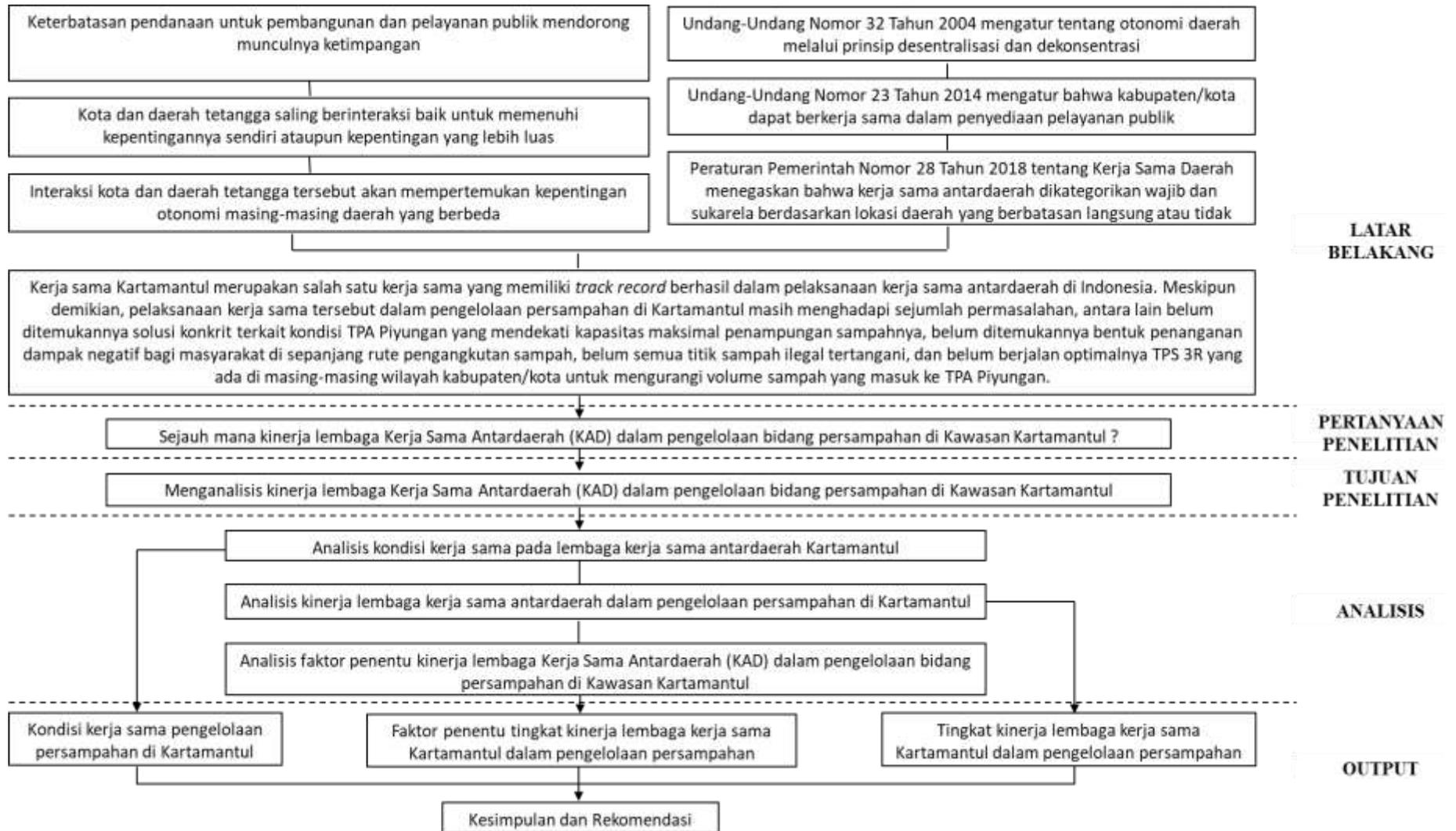
1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui kondisi kerja sama pengelolaan persampahan di Kartamantul
2. Dapat mengetahui tingkat kinerja dan faktor penentu kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan di Kartamantul
3. Sebagai salah satu pertimbangan dalam rekomendasi peningkatan kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan di Kartamantul
4. Secara teoritis dapat menambah rujukan dan pembelajaran terkait kerja sama antardaerah

1.6 Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka berpikir penulis mengenai kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul:



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data secara ilmiah guna mencapai tujuan tertentu (Sugiyono, 2014). Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan sebuah metode yang didasari oleh filsafat positivisme yang bertujuan untuk mengkaji suatu sampel atau populasi tertentu dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian dalam pengumpulan datanya dan data yang dihasilkan berupa data kuantitatif atau data statistik. Pada penelitian ini, pendekatan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahapan dalam kegiatan penelitian yang berguna untuk mengumpulkan data dengan teknik yang tepat, hal ini dikarenakan teknik pengumpulan data yang tepat akan mempengaruhi validitas dan ketepatan data yang digunakan. Berdasarkan sumbernya, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung dengan menemui responden di lapangan guna menggali informasi yang akurat dan mengerti visualisasi lapangan secara langsung. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuisisioner dan wawancara.

- Kuisisioner adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada responden (Yunus, 2010). Dalam penelitian ini kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data. Penggunaan teknik pengumpulan data melalui kuisisioner ini ditujukan untuk menggali penilaian kinerja kelembagaan menurut orang-orang yang terlibat dalam Sekretariat Bersama Kartamantul dan instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul.
- Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara penggalian informasi melalui sumber yang terpercaya. Pada penelitian ini wawancara ditujukan kepada pihak terlibat dalam Sekretariat Bersama Kartamantul dan instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul. Penggunaan teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara detail terkait hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan melalui teknik kuisisioner termasuk faktor penentu kinerja tersebut.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah cara mendapatkan data secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian literatur dan telaah dokumen.

- Kajian literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder melalui berbagai sumber bacaan. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh teori, konsep, dan informasi terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian literatur ini dapat diperoleh dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal ilmiah, buku, situs pencarian internet, dan hasil penelitian terdahulu dari berbagai sumber publikasi. Kajian literatur dalam penelitian ini membahas mengenai kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul.
- Telaah dokumen ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi/data dari dokumen terkait. Dalam penelitian ini, data/informasi dari dokumen yang dibutuhkan dapat didapatkan melalui survey ke instansi terkait atau dengan *browsing* internet. Dokumen yang ditelaah dalam penelitian ini adalah dokumen laporan kegiatan Sekretariat Bersama Kartamantul dan dokumen lain yang terkait dengan analisis kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul.

1.7.2 Data Penelitian

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian ini, maka diperlukan data-data penelitian yang bersifat data primer maupun data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui teknik kuisisioner dan wawancara. Kemudian data sekunder didapatkan dari hasil telaah dokumen yang berkaitan dengan lembaga kerja sama antardaerah Kartamantul. Daftar data penelitian yang digunakan dalam penelitian kinerja lembaga kerja sama antardaerah Kartamantul pada **Tabel I.1**:

Tabel I.1 Data Penelitian

Sasaran	Variabel	Nama Data	Tahun	Teknik Pengumpulan	Sumber
Menganalisis kondisi kerja sama pada lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) Kartamantul	Kondisi kerja sama pada lembaga kerja sama antardaerah (KAD) Kartamantul	Gambaran kondisi pengelolaan persampahan sebelum kerja sama	Sebelum 2001	Sekunder Telaah Dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Gambaran kondisi pengelolaan persampahan saat ini	Terbaru	Sekunder Telaah Dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Rencana kegiatan kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Sekunder Telaah Dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Laporan pelaksanaan kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Sekunder Telaah Dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Mekanisme kerja sama	Terbaru	Sekunder Telaah Dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
Menganalisis kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul.	Transparansi	Mekanisme akses data dan informasi kerja sama pengelolaan bidang persampahan	Terbaru	Sekunder Telaah Dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Kemudahan akses data dan informasi kerja sama pengelolaan bidang persampahan	Terbaru	Primer Kuisisioner dan Wawancara	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
	Partisipatif	Keikutsertaan aktor kerja sama dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Sekunder Telaah dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Tingkat keikutsertaan aktor kerja sama dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Primer Kuisisioner dan Wawancara	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
	Akuntabilitas	Laporan pelaksanaan kerja sama pengelolaan persampahan secara berkala	Terbaru	Sekunder Telaah Dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah

Sasaran	Variabel	Nama Data	Tahun	Teknik Pengumpulan	Sumber
Menganalisis faktor penentu kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul.		Penilaian pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Primer Kuisisioner dan Wawancara	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
	Evaluasi berkala	Jumlah rapat/forum koordinasi kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Primer Kuisisioner	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Jumlah rapat/forum evaluasi kerja sama pengelolaan persampahan secara berkala	Terbaru	Primer Kuisisioner	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
	Sinergitas dan Saling Menguntungkan	Program kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Sekunder Telaah Dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Penilaian manfaat kerja sama pengelolaan persampahan oleh para pelaku kerja sama	Terbaru	Primer Kuisisioner dan Wawancara	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
	Efektivitas	Rencana kegiatan kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Sekunder Telaah dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Penilaian ketercapaian rencana kegiatan kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Primer Kuisisioner dan Wawancara	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
	Efisiensi	Penilaian biaya-manfaat kerja sama pengelolaan persampahan	Terbaru	Primer Kuisisioner dan Wawancara	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
	Perataan	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran iuran oleh masing-masing kabupaten/kota • Deskripsi hak dan kewajiban masing-masing kabupaten/kota 	Terbaru	Sekunder Telaah dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Penilaian perataan hak dan kewajiban masing-masing kabupaten/kota (iuran dan kesempatan)	Terbaru	Primer Kuisisioner dan Wawancara	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
	Kompetensi	Penilaian kemampuan lembaga kerja sama antardaerah dalam	Terbaru	Primer Kuisisioner dan Wawancara	Sekretariat Bersama Kartamantul dan

Sasaran	Variabel	Nama Data	Tahun	Teknik Pengumpulan	Sumber
		menyelesaikan masalah dalam lingkup pengelolaan persampahan			Instansi Pemerintah
	Integrasi	Struktur dan tupoksi lembaga kerja sama antardaerah	Terbaru	Sekunder Telaah dokumen	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah
		Penilaian terhadap struktur dan tupoksi lembaga kerja sama dalam pengelolaan persampahan	Terbaru	Primer Kuisisioner dan Wawancara	Sekretariat Bersama Kartamantul dan Instansi Pemerintah

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

1.7.3 Teknik Sampling

Dalam suatu penelitian, 3 (aspek) utama penelitian, yaitu *pertama* berkaitan dengan eksistensi populasi, *kedua* objek yang akan diteliti, dan *ketiga* bertautan dengan cara-cara analisis (Yunus, 2010). Di dalam suatu penelitian objek yang diteliti diwakilkan oleh populasi atau sampel. Populasi diartikan sebagai satuan elementer yang mempunyai karakteristik dasar yang sama atau dianggap sama dan dicerminkan dalam bentuk ukuran-ukuran tertentu (Yunus, 2010), sementara sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki proporsi jumlah dan karakteristik yang mewakili keseluruhan populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Karena terdapat keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga dan finansial, maka sampel digunakan untuk diteliti mewakili populasinya.

Dalam menentukan sampel penelitian, dibutuhkan teknik sampling, agar penentuan sampel penelitian menjadi valid dan benar-benar mewakili seluruh objek populasi yang akan diteliti. Teknik sampling adalah teknik ilmiah yang digunakan untuk menentukan sampel. Menurut Yunus (2010) terdapat dua jenis teknik sampling, yaitu *pertama* teknik sampling secara acak/*random sampling* yang berarti tiap bagian dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dan *kedua* teknik sampling secara non acak/*non-random sampling* yaitu teknik sampling yang memilih sampel secara khusus karena memiliki tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini digunakan teknik *non-random sampling* yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*, yang mana teknik ini dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel. Sampel yang digunakan dalam teknik ini adalah sampel yang dipilih dengan cermat agar hasilnya benar-benar relevan dengan penelitian. Dengan demikian diusahakan agar sampel yang terpilih dapat merepresentasikan populasinya dengan tepat.

Tabel I.2 Kriteria Pemilihan Narasumber

Narasumber	Kriteria	Justifikasi Pemilihan Narasumber
1. Sekretariat Bersama Badan Kerja Sama Antardaerah (BKAD) Kartamantul		
Pelaksana Kantor Sekretariat Badan Kerja Sama Antardaerah Kartamantul	<ul style="list-style-type: none"> Menduduki jabatan tertentu dalam instansi Berperan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama Memahami karakteristik dan kondisi objek penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Pihak yang memiliki otoritas dan terlibat langsung dalam kerja sama dan bidang pengelolaan yang dikerja samakan Memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama
2. Instansi Pemerintah		
a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> Menduduki jabatan tertentu dalam instansi Terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama Memahami karakteristik dan kondisi objek penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Pihak yang memiliki otoritas dan terlibat langsung dalam kerja sama dan pengelolaan persampahan Mengikuti dan memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama
b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	<ul style="list-style-type: none"> Menduduki jabatan tertentu dalam instansi Terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama Memahami karakteristik dan kondisi objek penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Pihak yang memiliki otoritas dan terlibat langsung dalam kerja sama dan pengelolaan persampahan Mengikuti dan memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama
c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> Menduduki jabatan tertentu dalam instansi Terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama Memahami karakteristik dan kondisi objek penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Pihak yang memiliki otoritas dan terlibat langsung dalam kerja sama dan pengelolaan persampahan Mengikuti dan memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan justifikasi di atas, ditetapkan jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 4 (empat) sampel yang terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu Sekretariat Bersama Badan Kerja Sama Antardaerah (BKAD) Kartamantul dan Instansi pemerintah.

1.7.4 Teknik Analisis

Tahapan analisis ini merupakan tahapan lanjutan setelah data primer maupun data sekunder terkumpul. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas hasil analisis tingkat kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data kuantitatif yang sudah dikumpulkan dan diolah sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum (Yunus, 2010). Analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kerja sama pada lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) Kartamantul dan menganalisis faktor penentu kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) Kartamantul tersebut. Data yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif ini adalah data hasil telaah dokumen yang memiliki keterkaitan dalam penelitian kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul dan hasil analisis skoring dan pembobotan dari pengolahan hasil kuisioner yang diperkuat dengan data hasil wawancara responden.

- Analisis Skoring dan Pembobotan

Dalam analisis skoring dan pembobotan digunakan skala pengukuran yang menjadi acuan dalam menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, yang mana alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran dan akan menghasilkan data kuantitatif. Analisis skoring dan pembobotan pada penelitian ini digunakan untuk menilai dan menganalisis tingkat kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah hasil kuisioner penilaian dari responden. Hasil dari analisis ini akan berupa tingkatan lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul. Dalam analisis skoring tersebut digunakan skala likert, yang mana skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi kelompok tentang fenomena sosial dan jawaban-jawaban setiap instrumen dengan rentang positif hingga negatif. Untuk menentukan jumlah kelas digunakan pendekatan $1 + 3,3 \log n$, yang mana n merupakan jumlah sampel. Jumlah sampel seperti telah dijelaskan adalah berjumlah 4, maka perhitungan untuk menentukan jumlah kelas adalah sebagai berikut :

Banyaknya kelas interval (k)

$$k = 1 + 3,3 \log n, \text{ yang mana } n = \text{banyaknya data } (n=4)$$

$$k = 1 + 3,3 \log$$

$$k = 1 + 1,99$$

$$k = 2,99 \sim 3$$

maka jumlah kelas yang digunakan dalam analisis skoring dengan skala likert adalah 3 kelas.

Tabel I.3 Skoring Per Kriteria

Sasaran	Variabel	Indikator	Kriteria Skor		
			Rendah	Sedang	Tinggi
Analisis kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul	Transparansi	Kemudahan untuk mengakses data dan informasi kerja sama pengelolaan bidang persampahan	1	2	3
	Partisipatif	Semua pihak yang bekerja sama terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama pengelolaan persampahan	1	2	3
	Akuntabilitas	Adanya laporan pelaksanaan kerja sama pengelolaan persampahan secara berkala	1	2	3
	Evaluasi berkala	Adanya rapat/forum koordinasi kerja sama pengelolaan persampahan	1	2	3
		Adanya rapat/forum evaluasi kerja sama pengelolaan persampahan secara berkala	1	2	3
	Sinergitas dan saling menguntungkan	Program kerja sama pengelolaan persampahan memberikan keuntungan bagi masing-masing kabupaten/kota	1	2	3
	Efektivitas	Ketercapaian tujuan kerja sama pengelolaan persampahan	1	2	3
	Efisiensi	Hasil diperoleh dari kerja sama pengelolaan persampahan > Iuran tahunan	1	2	3
	Perataan	Ketiga kabupaten mempunyai hak dan kewajiban yang adil dalam BKAD <ul style="list-style-type: none"> • Iuran • Kesempatan 	1	2	3
	Kompetensi	Kemampuan lembaga kerja sama antardaerah dalam menyelesaikan masalah dalam lingkup pengelolaan persampahan	1	2	3
Integrasi	Lembaga kerja sama adalah lembaga yang terintegrasi dan mandiri, serta mempunyai tupoksi sendiri dalam pengelolaan persampahan	1	2	3	

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

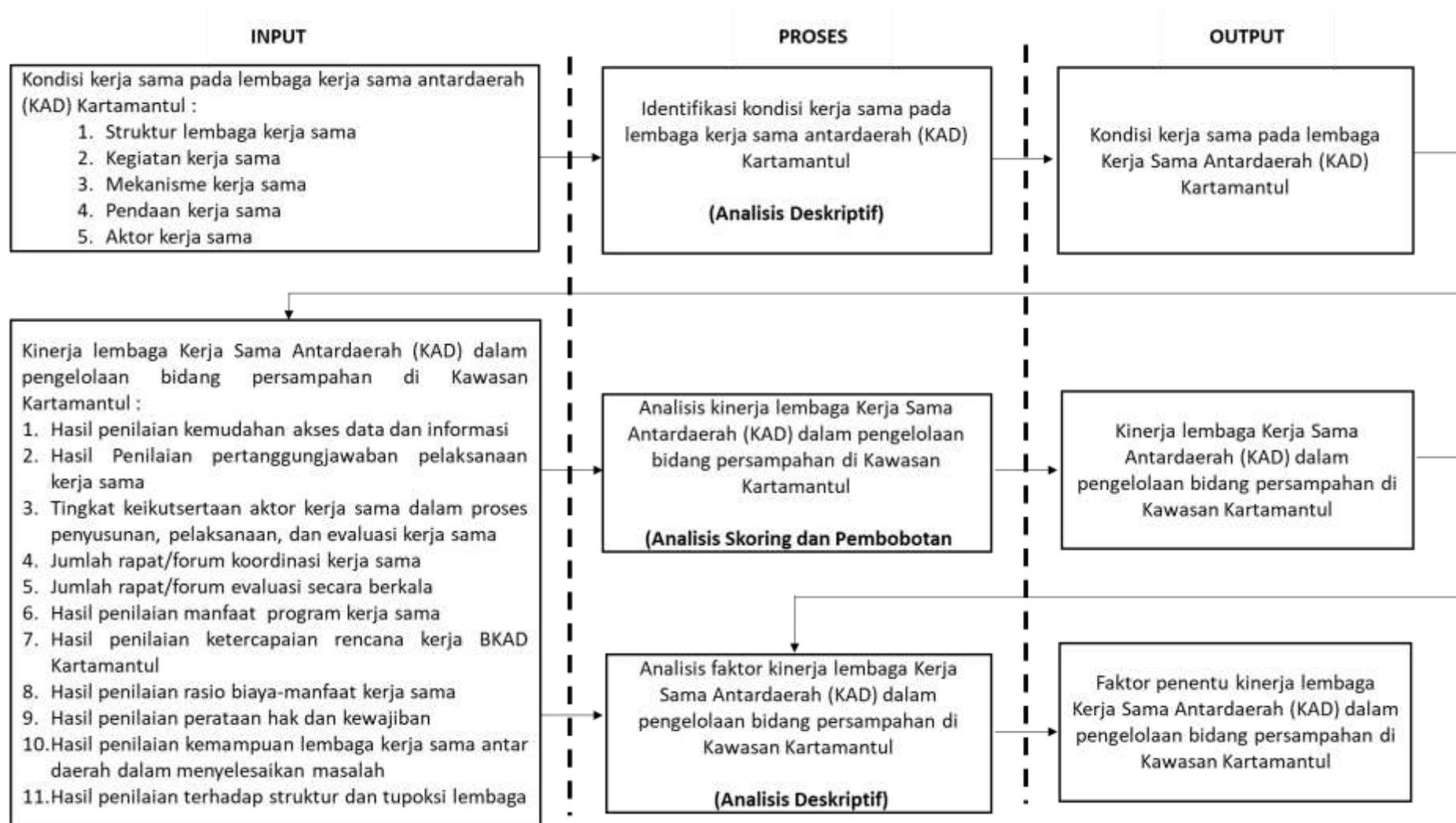
Tabel I.4 Pembobotan Per Variabel

Sasaran	Variabel	Indikator	Bobot
Analisis kinerja lembaga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul	Transparansi	Kemudahan untuk mengakses data dan informasi kerja sama pengelolaan bidang persampahan	10 %
	Partisipatif	Semua pihak yang bekerja sama terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama pengelolaan persampahan	10 %
	Akuntabilitas	Adanya laporan pelaksanaan kerja sama pengelolaan persampahan secara berkala	10 %
	Evaluasi berkala	Adanya rapat/forum koordinasi kerja sama pengelolaan persampahan	10 %
		Adanya rapat/forum evaluasi kerja sama pengelolaan persampahan secara berkala	
	Sinergitas dan saling menguntungkan	Program kerja sama pengelolaan persampahan memberikan keuntungan bagi masing-masing kabupaten/kota	10 %
	Efektivitas	Ketercapaian tujuan kerja sama pengelolaan persampahan	10 %
	Efisiensi	Hasil diperoleh dari kerja sama pengelolaan persampahan > Iuran tahunan	10 %
	Perataan	Ketiga kabupaten mempunyai hak dan kewajiban yang adil dalam BKAD <ul style="list-style-type: none"> • Iuran • Kesempatan 	10 %
	Kompetensi	Kemampuan lembaga kerja sama antardaerah dalam menyelesaikan masalah dalam lingkup pengelolaan persampahan	10 %
Integrasi	Lembaga kerja sama adalah lembaga yang terintegrasi dan mandiri, serta mempunyai tupoksi sendiri dalam pengelolaan persampahan	10 %	

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

1.8 Kerangka Analisis

Berikut kerangka analisis yang menjabarkan proses analisis dalam penelitian ini:



Gambar 1.3 Kerangka Analisis

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR KINERJA LEMBAGA KERJA SAMA ANTARDAERAH (KAD) DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAWASAN KARTAMANTUL

Bab ini berisi tentang kajian literatur dan sintesis literatur. Kajian literatur merupakan kumpulan teori pendukung mengenai kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan yang digunakan sebagai landasan dalam proses analisis.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA SAMA ANTARDAERAH KARTAMANTUL

Bab ini menjelaskan tentang gambaran wilayah yaitu terkait kondisi fisik, kondisi demografi, dan kondisi persampahan di Kartamantul dan gambaran Sekretariat Bersama Kartamantul sebagai lembaga kerja sama antardaerah di Kartamantul, penjelasan tersebut terdiri dari sejarah pembentukan kerja sama, visi dan misi lembaga, struktur organisasi, periode pengelolaan persampahan, ruang lingkup dan kegiatan kerja sama pengelolaan persampahan.

BAB IV ANALISIS KINERJA LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAWASAN KARTAMANTUL

Bab ini berisi tentang seluruh analisis yang dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh dan diolah. Hasil analisis tersebut kemudian akan menggambarkan kondisi kerja sama pengelolaan persampahan yang ada di Kawasan Kartamantul, menjelaskan tingkat kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan dan perbandingannya dengan masalah penelitian, serta menjelaskan faktor penentu kinerja lembaga kerja sama antardaerah tersebut dalam melakukan pengelolaan persampahan. Pada bagian akhir terdapat temuan studi yaitu ringkasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian. Kesimpulan yang telah didapatkan akan menghasilkan rekomendasi sehingga dapat meminimalkan masalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA